

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta, 1984.
- Abd. Rahman dan Baso Madiong, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Celebes Merdia Perkasa, Makassar, 2017.
- Arenawati, *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan Cet. Ke-2*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Deddy Supriadi dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- LKAAM, *Pelajaran Adat Minangkabau*, Tropic Offset, Bandung, 1997.
- _____, *Bunga Rampai Pengetahuan Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah, Padang, 2000.
- M. Amir Sutan, *Adat Minangkabau, Tujuan dan Pola Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1997.
- M. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) Cet.IV*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Ni'matul Huda, *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia Pilihan atas Federalisme atau Negara Kesatuan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soeharyono Soemarwoto, *Catatan Penting Ke-Indonesia-an Kita 1 Kompilasi Pemikiran & Opini Dipublikasikan oleh Harian Kaltim Post Sejak 2015*, Budi Utama, Yogyakarta, 2018.

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Totok Soeprijanto, *Sumber-Sumber Kewenangan*, Widyaiswara Pusdiklat PSDM.

Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.

B. Jurnal

Riki Rahmad, “Mengembalikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah”, Februari 2015.

C. Dokumen

Bahan Kuliah Kurnia Warman, *Hukum Pemerintahan Nagari*.

Dokumen Profil Nagari Duo Koto Tahun 2017.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.

E. Internet

<<http://mataairradio.com/berita-top/tanah-aset-desa>>[04/03/18].

<<http://www.harianjogja.com/baca/2017/08/30/korupsi-bantul-dugaan-korupsi-aset-desa-rp360-juta-terbongkar-847417>>[04/03/18].

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat> [02/03/18].

